

SIARAN PERS

OJK DORONG PENGUATAN PASAR OBLIGASI DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI ASEAN

OJK dan ADB Gelar ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) 2026

Yogyakarta, 2 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) terus berupaya mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan Asia, serta memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici dalam sambutannya pada pembukaan rangkaian kegiatan *45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events* di Yogyakarta, Senin.

ABMF Meeting digelar OJK bersama ADB yang bertujuan juga untuk mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.

“Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan. Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman atas dinamika pasar obligasi,” kata Retno Ici.

Mengenai program keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menjelaskan bahwa OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

POJK dimaksud memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan (*green*), aspek sosial dan keberlanjutan lainnya. Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.

Sedangkan, mengenai pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (*Local Currency Bond Market*), OJK mendorong agar bisa meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.

OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai *outstanding* obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan (termasuk kategori *green*, *social*, *sustainability*, dan *sustainability-linked*) telah mencapai Rp54,94 triliun (setara USD3,28 miliar).

Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana mengatakan keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi pengembangan utama untuk mencapai peningkatan

ekonomi yang inklusif dan dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goal's (SDG's)* di Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah telah melakukan pengembangan berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (obligasi SDG dan obligasi biru), dan skema pembiayaan gabungan untuk membiayai proyek yang mendukung SDG's. Akan tetapi terdapat tantangan dalam keuangan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pendanaan, sehingga, peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan.

Lebih lanjut berdasarkan *Sustainable Development Report 2025*, Indonesia memperoleh nilai 70,2 (di atas rata-rata global di 69,5). Indonesia pun telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG's. Selain itu, Indonesia memiliki rencana jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian dan visi dimaksud menjadi signal positif bagi sektor swasta atau instansi lain untuk berinvestasi pada agenda Pembangunan di Indonesia.

Penyelenggaraan rangkaian kegiatan *45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events* yang diselenggarakan OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dilaksanakan selama tiga hari (2-4 Februari 2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid* dan diikuti oleh 200 peserta dari seluruh negara anggota serta pemangku kepentingan kawasan.

Dalam rangkaian acara tersebut, OJK juga menyelenggarakan *Indonesia Session* berupa diskusi panel sebagai sarana untuk menyampaikan perkembangan terkini Pasar Modal Indonesia dengan mengusung tema strategis yaitu "*Integrating Sustainable Finance in Indonesia's Economic Development and Asia's Growth*", dan "*Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy*". Narasumber dalam sesi dimaksud berasal dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) serta organisasi internasional seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.

Selain rangkaian ABMF, diselenggarakan pula *Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF)* dan *3rd Digital Bond Market Forum (DBMF)* yang melibatkan negara-negara ASEAN+3. Secara garis besar, DBMF akan berfokus pada pembahasan tentang aset digital, sementara CSIF akan berfokus pada studi kasus bisnis nyata untuk mendorong transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah serta mewujudkan keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek terpusat di kawasan ASEAN+3.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK - M. Ismail Riyadi
Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id